



Sultan Minta Warga Tak Egois

■ Hari Ini DIY Terapkan Kebijakan PPKM Darurat

Bagaimana masyarakat lebih punya kesadaran dan kemauan untuk tidak egois. Mari menahan diri. Kalau tidak perlu, tidak usah keluar rumah.

YOGYA, TRIBUN - Pemda DIY menerapkan kebijakan Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, telah menggelar rapat koordinasi bersama bupati dan wali kota, Jumat (2/7).

Pertemuan Sultan dengan bupati dan wali kota se-DIY membahas pelaksanaan pelaksanaan PPKM Darurat. Kebijakan dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk menekan lonjakan kasus terkonfirmasi Covid-19 itu berlaku 3-21 Juli 2021 mendatang. "Kita akan melaksana-

kan PPKM Darurat. Semoga kebijakan tersebut efektif membatasi mobilitas di tengah lonjakan kasus Covid-19. Surat keputusan gubernur, bupati, dan wali kota segera kami selesaikan," terang Sultan di kompleks Kepatihan.

Sultan meminta kepada seluruh warga DIY untuk memiliki kesadaran dan tak berlakui egois. "Bagaimana masyarakat lebih punya kesadaran dan kemauan untuk tidak egois. Mari menahan diri. Kalau tidak perlu, tidak usah keluar rumah," paparnya.

Sesuai arahan pemerintah pusat, Pemda DIY akan membatasi secara ketat aktivitas di ruang publik. Pemda DIY juga bakal menutup tempat wisata hingga pusat perbelanjaan. Rumah makan atau restoran boleh buka, tapi dilarang melayani makan di tempat.

"Tujuannya untuk mengurangi kerumunan. Sebab, untuk makan, kita pasti buka masker," tambah Sultan. Sultan menegaskan, bilamana masih ditemukan pelanggaran, yang bersang-

● halaman 11

Sultan Minta

● Sambungan Hal 1

kutan akan langsung mendapatkan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.

"Tidak ada pilihan bagi kita untuk menurunkan kasus Covid-19, kecuali memang kemauan dari warga mengurangi mobilitas tidak perlu. "Karenanya, seluruh aspek yang berkaitan dengan hukum kami terapkan secara tegas sesuai prosedur," kata Sultan.

Sultan mengemukakan, pemerintah pusat bakal menyalurkan bantuan sosial kepada warga miskin selama pemberlakuan PPKM Darurat, termasuk di DIY. Akan tetapi, soal teknis pelaksanaan, Pemda DIY masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.

"Pemerintah sanggup untuk menyalurkan bantuan langsung tunai. Memang tidak by design karena pemerintah pusat tidak memperkirakan kondisi akan parah. Namun, bantuan akan didistribusikan lagi, baik pusat maupun daerah," tutur Sultan.

Sultan menyatakan akan terus memantau perkembangan penerapan PPKM Darurat di DIY. Setiap tiga hari hingga lima hari, Pemda DIY akan menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah pusat untuk mengevaluasi penerapan kebijakan tersebut.

"Kami bersama pemerintah pusat mengadakan pertemuan untuk evaluasi penerapan kebijakan PPKM Darurat. Jika kasus penularan Covid-19 bisa ditekan, tak menutup kemungkinan pemerintah segera memberi selongkaran aktivitas warga," jelas Sultan.

Kendati begitu, kata Sultan, pemerintah tetap harus menjaga kesinambungan. Jangan sampai ketika aktivitas warga mulai dilonggarkan, beberapa hari kemudian kasus Covid-19 di DIY melonjak lagi. Pemerintah akan memantau dan mengevaluasi secara tepat.

Sultan juga memastikan bahwa saat ini anggaran untuk penanganan Covid-19 di DIY masih mencukupi. Untuk diketahui, Pemda DIY telah mengalokasikan Rp435 miliar untuk penanganan Covid-19. Ada pula anggaran dari Belanja Tak Terduga senilai Rp20 miliar.

"Setiap daerah punya anggaran untuk penanganan Covid-19, termasuk yang bersifat darurat. Semua sudah terencana. Kan, pandemi Covid-19 sudah berlangsung lebih dari setahun. Sampai sekarang, anggaran untuk penanganan Covid-19 masih cukup," ungkapnya.

stono, S.Sos, MM
inf. 19030723 199603 1 005

Operasi kemanusiaan

Berdasarkan rapat koordinasi bersama Sultan, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menerapkan secara resmi PPKM Darurat mulai Sabtu (3/7) hari ini. Masyarakat diminta mematuhi semua aturan, termasuk pembatasan yang diterapkan hingga 20 Juli 2021.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Herce Poerwadi, menuturkan, Pemkot Yogyakarta telah mengantongi petunjuk teknis penerapan PPKM Darurat. Ia mengatakan, melalui penerapan PPKM Darurat, Pemkot Yogyakarta menjadikan faktor kesehatan sebagai prioritas.

"Pertumbuhan kasus Covid-19 di Kota Yogyakarta

Tid

semakin meningkat. Sumber penularannya pun sangat sulit untuk dilacak. Artinya, banyak orang sehat terpapar sehingga Pemkot Yogyakarta harus menjaga agar orang yang berisiko tidak tertular, ujarnya.

Heri mengatakan, PPKM Darurat menjadi semacam operasi kemanusiaan untuk menyelamatkan seluruh masyarakat. Karenanya, ia berharap masyarakat bisa semakin disiplin. Selama 17 hari ke depan, ucapnya, warga diminta untuk berada di rumah saja.

"Mari bersama-sama memulihkan kondisi dan menurunkan kasus Covid-19. Semoga kesehatan tertangani dan perlahan memulihkan perekonomian. Kami berharap masyarakat kian sadar dengan menerapkan protokol kesehatan dan mengurangi mobilitas," katanya.

Seperti halnya Pemkot Yogyakarta, Pemkab Bantul pun menerbitkan PPKM Darurat mulai hari ini. Bupati Bantul mengeluarkan Instruksi Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang PPKM di Kabupaten Bantul. Segala aktivitas akan dibatasi untuk menekan penyebaran Covid-19.

"Reputasi tersebut merupakan titik lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penerapan PPKM Darurat. Jarak sosial dan Instruksi Gubernur DIY Nomor 17 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat di DIY," kata Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

Ia mengimbau, PPKM Darurat adalah seluruh aktivitas, baik ekonomi, sosial, keagamaan, maupun pariwisata, di Kabupaten Bantul akan diperketat hingga 20 Juli 2021.

"Kabupaten Bantul masuk zona PPKM Darurat. Semua wilayah di Kabupaten Bantul akan diperlakukan sama. Tidak ada lagi zona hijau, kuning, oranye, merah. Semua aktivitas masyarakat akan dibatasi dan ditegaskan sanksi tegas bagi pelanggar," bebernya.

Selama 17 hari ke depan, tempat pariwisata yang dikelola pemerintah, kelompok sadar wisata, desa wisata, maupun investor akan ditutup. Pemkab Bantul memang tidak akan melakukan penutupan di perbatasan, tetapi melakukan pengawasan di tempat-tempat wisata.

"Tempat ibadah di Kabupaten Bantul ditutup sementara. Kegiatan keagamaan, baik di masjid maupun di luar masjid, ditiadakan. Kegiatan kebudayaan, kesenian, juga untuk sementara stop. Resepsi pernikahan dibatasi 30 orang dan tidak makan di tempat," paper Halim.

Pemkab Bantul, sebutnya, akan pula menunda pembelajaran tatap muka sampai kondisi memungkinkan. Warung, rumah makan, dilarang menyediakan layanan makan di tempat. Pasar tradisional hanya buka sampai pukul 13.00 dan hanya dibatasi 50 persen dari kapasitas.

"Jam operasional supermarket dibatasi, yakni sampai pukul 20.00. Kemudian, seluruh area publik tidak lagi boleh digunakan untuk kegiatan apapun, termasuk olahraga. Untuk sementara, kami persilakan masyarakat berolahraga di rumah masing-masing," jelas Halim.

Sanksi tegas

Ia menyampaikan, PPKM Darurat menyaratkan kesadaran masyarakat untuk lebih ketat dalam menerapkan protokol kesehatan serta tindakan lebih tegas jika ada yang melanggar. Tindakan tegas diterapkan karena penularan Covid-19 di Kabupaten Bantul sangat mengkhawatirkan.

Menurut Halim, dalam Instruksi Bupati Nomor 17 Tahun 2021, memang tidak menguraikan sanksi-sanksi bagi pelanggar PPKM Darurat. Namun, pemberian sanksi dapat melalui penerapan peraturan perundangan lain, semisal regulasi tentang karantina dan aturan sejenis.

"Peraturan-peraturan itu akan kami terapkan manakala ada pihak-pihak yang melanggar atau melanggar penerapan PPKM Darurat. Aparat penegak hukum, didampingi Satuan Polisi Pamong Praja, bakal menilainya mana pelanggaran yang dilakukan," urai Halim.

Yang paling penting, sambungnya, adalah komitmen perang terhadap Covid-19. Semua masyarakat Kabupaten Bantul adalah pasukan perang. Jadi, untuk mengatasi Covid-19, jangan hanya pasrah kepada pemerintah saja. Warga harus bersatu, saling mengustikan.

Kapolres Bantul, AKBP Ihsan, berjanji meningkatkan penegakan aturan saat PPKM Darurat. Pihaknya akan terus menggelar operasi yustisi bersama Satpol PP dan TNI. Satu sasaran utamanya adalah Taman Paseban Bantul, yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

"Kami akan menyisir semua tempat di Kabupaten Bantul, khususnya di taman-taman atau area publik serta angkringan. Kami akan secara tegas melakukan pembatasan kerumunan, bahkan penutupan. Kami bakal beroperasi keliling, terutama pada malam hari," katanya.

Penerapan paswara dan laruh

Terpisah, Bupati Gunungkidul, Sunaryanta, meminta dukungan dari panewu, lurah, hingga aparat selama masa PPKM Darurat. Sebab, kebijakan itu sangat menentukan laju perkembangan kasus Covid-19, ia sedang menyusun instruksi sebagai dasar pelaksanaan PPKM Darurat.

Sekda Kabupaten Gunungkidul, Drajad Ruswandono, menyambung, selama PPKM Darurat, ada penutupan sementara fasilitas publik maupun kegiatan ibadah, wisata, seni budaya, hingga olahraga. Kegiatan sosial seperti hajatan hingga takziah masih diperkenankan.

Wakil Bupati Gunungkidul, Heri Susanto, mengatakan, pelaksanaan PPKM Darurat akan dipantau langsung oleh pemerintah pusat. Nantinya, pemantauan virtual dilakukan oleh Menko Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai koordinator.

Heri menyatakan, ada penugasan langsung kepada aparat untuk membantu pelaksanaan PPKM Darurat agar efektif. Jika penerapan PPKM Darurat benar-benar berjalan sesuai harapan, kasus Covid-19 di Kabupaten Gunungkidul diperkirakan bisa turun dalam waktu sepekan.

Bupati Sleman, Kusti Sri Purnomo, juga meminta ke-

pada panewu dan lurah untuk membentuk gugus tugas atau posko Covid-19 dengan bantuan pemimpin di tingkat lebih kecil, katanya. Penyebaran virus corona tidak akan bisa terkendali.

"Telusunya, setiap dua hari atau tiga hari, pelaksanaan PPKM Darurat di Kabupaten Sleman akan dilaporkan ke Pemda DIY dan Pak Luhut (Binsar Pandjaitan). Kabupaten Sleman langsung dipantau pusat mengingat kasus penyebaran Covid-19 sangat tinggi," jelas Kusti.

Sekda Kabupaten Sleman, Harda Kiswaya, berharap para pemangku kebijakan bisa melakukan sosialisasi secara tepat kepada masyarakat agar memahami pelaksanaan PPKM Darurat. Pasalnya, ia mengutarakan, kebijakan PPKM Darurat sudah tidak bisa didiskusikan.

Harda menjanjikan, dalam Instruksi Bupati Sleman, sudah ada keterangan jelas, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Untuk itu, ia menegaskan, pemangku kebijakan setingkat lurah dan kapawen di Kabupaten Sleman dilarang memusik sendiri-sendiri.

"Satu hal lagi, tidak ada sekolah tatap muka selama PPKM Darurat. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman akan menyipati secara baik dan bisa mengkoordinasikan sekaligus melaksanakan perintah tersebut, termasuk dengan Kementerian Agama," paper Harda.

Sekada, Pemkab Kulon Progo siap menjalankan PPKM Darurat mulai hari ini. Bupati Kulon Progo, Sutedyo, mengatakan, destinasi wisata akan ditutup sementara. Anggota Satpol PP Kabupaten Kulon Progo akan melakukan patroli keliling, terutama pada malam hari.

Rakor baru

Sementara itu, Jember kemarin, kasus terkonfirmasi Covid-19 di DIY lagi-lagi memecahkan rekor penambahan harian. Ada penambahan 922 kasus terkonfirmasi positif Covid-19. Dengan penambahan tersebut, total terkonfirmasi Covid-19 di DIY menjadi 62.676 kasus.

Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19, Berty Murtiningih, mengatakan, penambahan konfirmasi positif terlarang lewat pemeriksaan mandiri 208 kasus, skrining karyawan kesehatan 15 kasus, dan tracing kontak 672 kasus. "27 kasus belum ada informasi," ucapnya.

Adapun, Berty mengutarakan, rincian distribusi terkonfirmasi positif Covid-19 menurut domisili meliputi Kota Yogyakarta 284 kasus, Kabupaten Bantul 200 kasus, Kabupaten Kulon Progo 92 kasus, Kabupaten Gunungkidul 38 kasus, serta Kabupaten Sleman 308 kasus.

Untuk penambahan pasien sembuh ada 353 kasus. Distribusi pasien sembuh meliputi Kota Yogyakarta 63 kasus, Kabupaten Bantul 146 kasus, Kabupaten Kulon Progo 47 kasus, Kabupaten Gunungkidul 38 kasus, serta Kabupaten Sleman 308 kasus.

"Total pasien sembuh menjadi 49.251 kasus. Di sisi lain, jumlah pasien meninggal dunia akibat Covid-19 juga bertambah 24 kasus. Dengan penambahan tersebut, sudah terdapat 1.620 orang meninggal dunia akibat Covid-19 di DIY. (yo/aka/into/bep)

2

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005